

PERSEPSI MASYARAKAT ATAS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR

*Hilmiati¹, Ernita Dewi², Zuherni³

^{1,2}Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry

³Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry

*email: 170304033@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Women's leadership is kind of women's participation in community leading intellectually and emotionally, which is contribute their energy, thoughts, and material to realize a certain goal. Therefore, in history, women's leadership come up as a significant issue until now days from local and global approach. However women leader especially in Aceh Besar District founded very rare, particularly the position as a village leader. To figure out the problem, this study try to describe the philosophical values in society toward women's leadership, and to find out the perception of the people of Darussalam Subdistrict, Aceh Besar Regency around the issue. In this sense, as a field research this research apply a qualitative type of research by using data collection techniques such as documentation, observation.and direct interviews. The results showed that the value of the philosophy of women's leadership displayed from the understanding of the community toward position of a woman, where women also have rights and freedoms in carrying out their obligations. Hence, women have important foundations in family life, organizations and the community.

Keywords: Leadership, woman, Aceh Besar.

Abstrak

Kepemimpinan perempuan merupakan suatu bentuk keikutsertaan perempuan dalam memimpin secara intelektual serta emosional dalam suatu kelompok yang dapat memberikan sumbangan yang baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materiil guna untuk dapat mewujudkan suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan perempuan khususnya di Kabupaten Aceh Besar, kepala desa yang dipimpin oleh perempuan menjadi hal yang sangat jarang dijumpai. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan nilai filosofis dalam kepemimpinan perempuan, serta mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap kepemimpinan perempuan. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berbasis penelitian lapangan, serta menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara langsung dengan masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, teknik pengumpulan data lainnya seperti dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai filosofi kepemimpinan perempuan dapat dilihat dari pemahaman masyarakat yaitu terletak pada kedudukan seorang perempuan. Dimana perempuan juga mempunyai hak dan kebebasan dalam menjalankan kewajibannya, serta Perempuan tidak lagi dipandang sebagai sosok yang lemah, akan tetapi memiliki fondasi penting dalam kehidupan keluarga, organisasi maupun lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Kepemimpinan, perempuan, Aceh Besar

A. Pendahuluan

Persoalan perempuan merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dan telah berlangsung hampir seusia dengan lahirnya kebudayaan Islam. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan sendiri dan hampir selalu menciptakan pro-kontra yang sangat luar biasa, bahwa perempuan kurang dan bahkan tidak dapat memainkan peran independen dalam tataran domestik dan publik. Perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan atas hak-hak kemanusiaannya sampai hari ini masih terus mendapat rintangan yang serius, antara lain dari pandangan keagamaan (Subhan, 2004).

Dalam fakta sejarah Islam, al-Quran telah menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan sudah ada sejak zaman dahulu, hal ini tergambar dalam kisah seorang ratu yang bernama Bilqis dari negeri Saba, Yaman Selatan. Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan dalam melawan Ali Bin abi Thalib. Keterlibatan Aisyah r.a bersama sekian banyaknya sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa al-Quran tidak diragukan lagi dalam memandang laki-laki dan perempuan dalam menafsirkan mengenai kesetaraan sebagai makhluk manusia dalam berbagai hal

Melalui prestasi kaum perempuan pada saat ini jauh lebih mengesankan, hal ini terlihat dari segi aspek pendidikan. Jumlah kaum perempuan buta huruf dalam masa-masa terakhir ini menurun secara drastis dibanding kaum laki-laki, peran kaum perempuan meningkat dengan pesatnya. Perjuangan mereka dalam mengesahkan arti *discrimination law* secara global telah membawa dampak yang besar terhadap kesempatan kerja kaum perempuan. Hingga menjabat pada posisi kepemimpinan dalam berbagai bidang, seperti pada masa sekarang ini dimana kaum perempuan Indonesia telah berhasil menduduki beberapa jabatan ke pemerintahan (Fakih, 1996).

Di Indonesia wacana pemimpin perempuan telah menyebar di permukaan sejak era tahun 1998. Dalam catatan wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara. Ini merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada masa sekarang perempuan telah banyak menduduki berbagai jabatan penting dalam masyarakat yang besar maupun yang kecil (Fakih, 1996).

Permasalahan kesenjangan gender sampai saat ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan terutama di Indonesia. Hingga saat ini perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan masih dapat ditemukan. Dapat di lihat dari berbagai hal, seperti dalam hal kepemimpinan, jumlah perempuan yang menjadi seorang pemimpin baik dibidang politik maupun bisnis masih kalah jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki (Ismawardi, 2018).

Perbedaan pandangan dan menganggap ketidakrelevansian antara keduanya menyebabkan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh realitas histori bahwa perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender terutama kepada perempuan, diantaranya adalah dapat dilihat terhadap lima fenomena sebagai berikut, *pertama* marginalisasi terhadap perempuan baik di rumah maupun tempat kerja. *Kedua*, subordinasi terhadap perempuan yang menyatakan bahwa perempuan emosional kecenderungan menyalahkan. *Ketiga* adalah pembagian dan irasional. *Keempat* yaitu perempuan terhadap suatu masalah kerja secara seksual. *Kelima* adalah berbagai bentuk kekerasan lainnya baik fisik maupun psikologis yang menimpa perempuan. Perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadi masalah manakala keadilan hak antara perempuan dan laki-laki diwujudkan secara bersamaan dan beriringan (Zakaria, 2013).

Sebagaimana dalam Islam, kepemimpinan perempuan ini diperbolehkan selama kepemimpinan tersebut baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam hal ini Islam juga memberikan batasan kepada perempuan yang disebabkan karena adanya beberapa kendala kodrati yang dimiliki oleh perempuan seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, serta menyusui, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kondisi perempuan menjadi lemah, sedangkan menjadi seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal (Fatimah, 2015).

Berbicara mengenai kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat, terutama di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor budaya, agama, serta kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat.

Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan Gampong sangat jarang dijumpai di Aceh. Khususnya di Kabupaten Aceh Besar hal ini budaya patriarki di Aceh masih sangat kental sehingga mengurangi peluang perempuan untuk menjadi seorang

pemimpin. Meski demikian, masih dapat dijumpai pemimpin perempuan yang berhasil dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan tersebut dapat saja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya dukungan serta peluang yang diberikan oleh peraturan daerah, atau lunturnya budaya patriarki masyarakat, ataupun disebabkan respons positif dari masyarakat. Berangkat dari asumsi di atas penulis tertarik meninjau lebih lanjut bagaimana nilai filosofis kepemimpinan perempuan dalam Islam serta dalam pandangan masyarakat, khususnya di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

B. Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka semua hasil dari data-data yang diperoleh dari penelitian ini didasarkan kepada data-data yang didapatkan di lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting suatu barang atau jasa yakni berupa kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, atau gejala-gejala sosial. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku, kejadian, tempat, dan waktu (Almansur, 2017).

C. Pembahasan

1. Diskursus Kepemimpinan Perempuan

Hal yang selalu menjadi kontroversi dalam perbincangan mengenai sosok perempuan ialah tentang boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin. Konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam yang akan dibahas dalam sub-bab ini dikhususkan pada pembahasan mengenai kepemimpinan dalam ranah publik di luar rumah tangga. Karena diskursus mengenai kepemimpinan perempuan di ranah publik ini lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan pembicaraan mengenai kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Salah satu orang yang menolak kepemimpinan perempuan di ranah publik ini ialah Abbas Mahmud al-Aqqad. Dia menjadikan perbedaan fisik dan biologis sebagai landasan perbedaan tanggung jawab sosial yang diemban oleh kedua jenis kelamin. Dengan adanya perbedaan tanggung

jawab sosial ini, maka laki-laki dinilai lebih berhak menjadi pemimpin karena laki-laki sudah terbiasa bertanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia menyatakan bahwa hak kepemimpinan bersumber pada kesanggupan alamiah yang tentu lebih dimiliki oleh kaum lelaki dibandingkan perempuan. Lebih jauh ia menyampaikan bahwa kerajaan seorang perempuan ada dalam rumah tangga, sedangkan kerajaan laki-laki ada di dalam perjuangan hidup (Al-Aqqad, 1986).

Lain halnya dengan Nasaruddin Umar seorang cendekiawan muslim kontemporer yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadits yang melarang kaum perempuan aktif di dunia politik. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk terjun ke dalam bidang politik baik sebagai pejabat atau pemimpin negara. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan di sekitar Nabi terlibat aktif dalam dunia politik. Nasaruddin Umar juga menegaskan bahwa kata khalifah pada surat al-Baqarah ayat 30 tidak merujuk hanya kepada satu jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki fungsi sebagai khalifah di muka bumi yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah SWT (Nasaruddin Umar, 2000).

Hal yang serupa disampaikan oleh Husein Muhammad, dengan terlebih dulu menjabarkan pandangan ulama-ulama klasik yang tidak memberikan peluang sama sekali untuk perempuan terlibat dalam dunia politik. Husein Muhammad kemudian menguraikan bahwa sejak awal abad ke-20, dengan terbukanya akses pendidikan bagi kaum perempuan, maka peluang partisipasi politik bagi kaum perempuan juga semakin terbuka. Hal ini ditandai dengan perubahan-perubahan dalam undang-undang yang lebih mengakomodasi kepentingan perempuan di ranah publik negara-negara Islam seperti Mesir, Sudan, Yordania, Tunisia, Irak, Iran, dan Suriah. Di Indonesia sendiri, aktivitas politik kaum perempuan telah memiliki landasan yuridis dalam UUD 1945. Apalagi sekarang, dengan adanya kebijakan 30% kursi di parlemen harus diisi oleh perempuan, maka tidak ada lagi alasan untuk melarang perempuan terjun langsung ke dalam politik (Husein Muhammad, 2004).

Kepemimpinan Aisyah di Perang Jamal di mana sejumlah sahabat Nabi yang terkenal bersatu di bawah komandonya merupakan bukti nyata bahwa perempuan juga mampu memimpin laki-laki. Kaukab Siddique menambahkan bahwa kepemimpinan

Aisyah ini bukanlah suatu hal yang muncul tiba-tiba saat perang Jamal terjadi, karena jauh sebelum itu yakni pada masa awal Islam Aisyah adalah orang yang selalu dimintai fatwa oleh para sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebelum Aisyah terjun memimpin pasukan di perang Jamal, beliau telah lebih dulu menjadi seorang guru yang fatwanya diterima oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Banyak orang yang datang dari seluruh penjuru dunia Arab untuk mendapatkan pengajaran dari istri Nabi yang terkenal cerdas itu. Bahkan, tak sedikit ulama dan guru para imam yang terkenal pada masa itu yang dulunya merupakan murid Aisyah (Kaukab Siddique, 2012).

KH. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, seorang ulama NU yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia ini tidak menampik kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin negara. Abdurrahman Wahid mengungkapkan bahwa sukses atau tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin sangat bergantung kepada penerimaan dari kaum laki-laki yang berada di bawah kepemimpinannya, apakah mereka bersedia bekerja sama di bawah komando perempuan tersebut atau tidak. Abdurrahman Wahid juga menyampaikan bahwa ungkapan ulama yang menyatakan bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga tidak bisa memimpin justru bertolak belakang dengan fakta sejarah bahwa banyak pemimpin negara yang sukses justru dari jenis kelamin perempuan. Misalnya Cleopatra, Ratu Balqis, Corie Aquino, Margaret Theatcher dan Benazir Butho. Bahkan Abdurrahman Wahid mengakui kemampuan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi seorang presiden, di samping karena ia memiliki nasab dari Soekarno yang merupakan pemimpin negara, kesuksesannya memimpin PDIP membuktikan bahwa Megawati memiliki kecerdasan dalam memimpin. Menurut pandangan Abdurrahman Wahid, apa yang dimiliki Megawati yaitu nasab dan kecerdasan dalam memimpin adalah landasan yang bisa menjadikan seseorang sebagai pemimpin di masa depan (M.N Ibad, 2011).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama-ulama klasik mayoritas tidak menyetujui jika perempuan menjadi pemimpin dalam ranah publik yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan ulama-ulama modern dan kontemporer saat ini lebih melihat ke dalam fakta sejarah dan realita yang ada sekarang bahwa banyak dari kaum perempuan yang memiliki kemampuan dalam bidang politik dan jabatan-jabatan penting di ranah publik yang biasanya didominasi oleh laki-laki.

a. Karakter Kepemimpinan Perempuan

Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dalam pembangunan bukan hanya sebagai proses pembangunan, tapi juga sebagai fondasi yang berstruktur kuat. Perjuangan akan figur R.A. Kartini dapat dirasakan dengan adanya pergerakan emansipasi perempuan. Keberadaan peran wanita sebagai pimpinan kini mulai dihargai dan disetarakan. Sejalan dengan gerakan emansipasi dan gerakan kesetaraan gender yang intinya berusaha menuntut adanya persamaan hak wanita dalam berbagai bidang kehidupan, maka setahap demi setahap telah terjadi pergeseran dalam memersepsi tentang sosok wanita. Mereka tidak dipandang lagi sebagai sosok lemah yang selalu berada pada garis belakang, namun mereka bisa tampil di garis depan sebagai pemimpin yang sukses dalam berbagai sektor kehidupan, yang selama ini justru dikuasai oleh kaum laki-laki. Wanita memiliki kemampuan yang sama untuk berada di posisi puncak dalam karier,” Faktanya, dalam berbagai organisasi saat ini, saat gaya kepemimpinan yang keras dan kaku tidak lagi sesuai untuk karyawan, gaya kepemimpinan wanita yang komprehensif serta nilai-nilai positif lainnya membuat mereka lebih cocok untuk menduduki posisi puncak. Wanita dapat menjadi pemimpin bila dididik dengan cara berbeda dan tidak melulu menganggap diri mereka sebagai wanita melainkan bagian dari sesama manusia.

Annisa Fitriani, mengemukakan lima ciri yang banyak dimiliki oleh perempuan pemimpin berdasarkan sejumlah penelitian sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk membujuk, wanita pemimpin umumnya lebih persuasif bila dibandingkan dengan pria, ia cenderung lebih berambisi dibandingkan pria – keberhasilannya dalam membujuk orang lain untuk berkata “ya” akan meningkatkan egonya dan memberinya kepuasan. Meskipun demikian, saat memaksakan kehendaknya, sisi sosial, feminin, dan sifat empatinya tidak akan hilang.
- 2) Membuktikan kritikan yang salah, mereka “belum bermuka tebal”, wanita pemimpin memiliki tingkat kekuatan ego yang lebih rendah dibandingkan pria, artinya mereka masih bisa merasakan rasa sakit akibat penolakan dan kritik. Namun, tingkat keberanian, empati, keluwesan, dan keramahan yang tinggi membuat mereka cepat pulih, belajar dari kesalahan, dan bergerak maju dengan sikap positif “akan saya buktikan”,

- 3) Semangat kerja tim, wanita pemimpin yang hebat cenderung menerapkan gaya kepemimpinan secara komprehensif saat harus menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mereka juga lebih fleksibel, penuh pertimbangan, dan membantu stafnya. Bagaimanapun, wanita masih harus banyak belajar dari pria dalam hal ketelitian saat memecahkan masalah dan membuat keputusan
- 4) Sang pemimpin, wanita pemimpin yang hebat umumnya memiliki karisma yang kuat, begitu juga pria. Mereka persuasif, percaya diri, serta berkemauan kuat untuk menyelesaikan tugas dan energik
- 5) Berani mengambil risiko, tidak lagi berada di wilayah yang aman, wanita pemimpin pada dasarnya berani melanggar aturan dan mengambil risiko, sama seperti pria sekaligus memberi perhatian yang sama pada detail. Mereka berspekulasi di luar batas-batas perusahaan, dan tidak sepenuhnya menerima aturan struktural yang ada, seperti peraturan dan kebijakan perusahaan (Annisa Fitriani, 2015).

b. Fakta Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Quran dan Hadits

Dalam fakta sejarah Islam, al-Quran telah menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan sudah ada sejak zaman dahulu, hal ini tergambar dalam kisah seorang ratu yang bernama Bilqis dari negeri Saba, Yaman Selatan. Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan dalam melawan Ali Bin abi Thalib. Keterlibatan Aisyah r.a bersama sekian banyaknya sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa al-Quran tidak diragukan lagi dalam memandang laki-laki dan perempuan dalam menafsirkan mengenai kesetaraan sebagai makhluk manusia dalam berbagai hal (Fatimah, 2015).

Kisah keberadaan kepemimpinan perempuan juga telah diabadikan dalam al-Qur'an surat an-Naml. Adapun kisah kepemimpinan yang diceritakan dalam surat tersebut adalah kisah seorang ratu Balqis yang hidup pada masa Nabi Sulaiman. Kisah ratu Balqis ini dimulai ketika burung Hud-hud terbang jauh dan kemudian menemukan sebuah kerajaan besar. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Naml ayat 23 yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: “ sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar” (Q.S an-Naml:23).

Ayat tersebut menggunakan pemilihan kata *inni* yang menunjukkan akan *taukid* (menguatkan) seterusnya dilanjutkan dengan kata *wajada*. Adanya *taukid* dalam ayat tersebut menunjukkan benar bahwa ada seorang perempuan yang memimpin negeri Saba'. Jadi dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa burung Hud-hud berhasil menemukan informasi secara langsung serta Hud-hud benar-benar mengamati serta melihat secara langsung keberadaan dan kondisi kerajaan tersebut. Kemudian kata *imra'ah* dalam ayat tersebut menunjukkan kepada seorang perempuan yang disebutkan secara *nakirah* (umum), serta tidak disebutkan secara jelas namanya dalam ayat tersebut. Ulama tafsir sepakat bahwa *imra'ah* dalam ayat tersebut merupakan Balqis bin Surahail, sang ratu Saba'.

Dalam hal ini al-Qur'an telah menggambarkan sosok pemimpin perempuan yang berhasil memberikan rakyatnya kesejahteraan serta kehidupan yang makmur dan memiliki kerajaan yang besar. Ini menandakan bahwa pernah ada sosok pemimpin perempuan yang terjun dalam wilayah publik serta mempunyai kemandirian politik dan karakteristik kepemimpinan yang baik dalam mengayomi rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang serta tidak membatasi perempuan dalam beraktivitas dan berkarir sesuai dengan *skill* dan keahliannya.

2. Nilai Filosofis kepemimpinan Perempuan

Perempuan merupakan komponen kesatuan masyarakat yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Perkembangan zaman terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup yang pantas membuat perempuan terjun mengambil bagian. Tuntutan ekonomi terutama bagi masyarakat kalangan bawah, menuntut perempuan untuk ikut bekerja. Pekerjaan yang tadinya hanya dikerjakan perempuan dilingkungan rumah tangga saja kini juga beralih sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Perkembangan kaum perempuan dalam era globalisasi telah membawa perubahan dalam perkembangan pembangunan bukan lagi hanya sebagai istri atau ibu semata, tetapi telah terfokus pada kualitas eksistensinya selaku manusia (Yulianti et al., 2018).

a. Nilai Normatif Agama

Berbicara mengenai kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat, terutama di kalangan masyarakat Kecamatan

Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Beberapa persepsi muncul dari pemahaman terhadap nilai normatif agama tentang posisi dan peran perempuan.

Keterbatasan perempuan disebabkan beberapa sifat alamiah yang dimiliki oleh perempuan seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, serta menyusui, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kondisi perempuan menjadi lemah, sedangkan menjadi seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal (Fatimah, 2015).

Dengan demikian, kepemimpinan merupakan suatu proses dimana individu dapat mempengaruhi individu yang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan suatu organisasi yang berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan dan direncanakan. Hal ini sangat berpengaruh dengan bagaimana cara seorang pemimpin mengapresiasi gaya kepemimpinannya sehingga mewujudkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat (DWI PRASETYONINGSIH, 2016).. Begitu juga dalam lembaga pemerintahan Gampong, yaitu kepala Gampong atau biasa disebut sebagai keuchik. Kepemimpinan di dalam lembaga pemerintahan Gampong, keuchik memiliki pengaruh yang cukup besar karena berhubungan langsung dengan masyarakat Gampong. Sehingga seorang keuchik harus memiliki kemampuan dalam merangkul ataupun mengayomi masyarakatnya

Dalam hal ini, ada sebuah hadist yang menerangkan larangan atau tidak sahnya perempuan tampil menjadi seorang pemimpin, berikut bunyi hadisnya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا تُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ لِامْرَأَةٍ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Uyainah telah menceritakan telah menceritakan kepada saya dari Abu Bakrah dari Nabi Muhammad Saw. bersabda: “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita”. (Ahmad bin Hambal, Tt:18).

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Turmuzi, an-Nasai, dan Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Sebagian ulama mendefinisikan hadis ini sebagai larangan atau tidak sahnya wanita tampil menjadi pemimpin, baik itu kepala negara atau presiden. Namun Imam at-Thabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik yang menyatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi pemimpin, baik itu presiden atau kepala negara. Adapun yang menjadikan hadis diatas sebagai dalil bahwa tidak dibenarkannya perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki ialah karena hadis tersebut redaksinya berbentuk khabar atau berita, tetapi maknanya adalah larangan. Artinya bahwa Rasul melarang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki.

Dalam hadist tersebut memang tidak menggunakan kalimat larangan, tetapi menggunakan kalimat pengingkaran atau peniadaan keuntungan serta keselamatan bagi suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya. Kalimat seperti dalam hadist tersebut tidak menimbulkan adanya larangan terhadap pengangkatan perempuan sebagai pemimpin pemerintah atau negara, maka dari itu menjadikan perempuan sebagai kepala pemerintahan atau negara bukanlah suatu pelanggaran syariat. Sebab, hadist diatas tersebut disampaikan Rasulullah ketika beliau mendapat informasi bahwa bangsa Persia menjadikan Putri Kisra sebagai ratu. Dari sini dapat dipahami bahwa hadist tersebut tertuju kepada putri Kisra, artinya putri Kisra yang di jadikan sebagai ratu itu menurut Nabi tidak akan sukses (Thalib, 2001).

Nilai filosofi dari kepemimpinan terletak pada kodrat atau kedudukan seorang perempuan, dimana perempuan juga mempunyai hak dan kebebasan dalam menjalankan kewajibannya. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai sosok yang lemah, akan tetapi memiliki fondasi penting dalam kehidupan keluarga, organisasi maupun lingkungan masyarakat. Namun dibalik hal tersebut, kepemimpinan seorang perempuan juga perlu dibatasi. Karena ada hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh perempuan dan harus dilakukan oleh laki-laki.

b. *Dinamika Kehidupan Sosial*

Kesamaan laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam Q.S at-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

عَنْ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ الْمُنْكَرَ وَيُقِيمُونَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ سَيَرَحْمُهُمُ اللَّهُ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana” (Q.S at-Taubah: 71).

Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, melainkan untuk keduanya baik laki-laki maupun perempuan secara bersamaan. Perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin, asalkan dia mampu dan memenuhi kriteria yang mencerminkan seorang pemimpin. Dalam tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar, kata “*Auliya*” mencakup wali dengan arti penolong solidaritas dan kasih sayang. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Qur’an tidak melarang perempuan untuk menduduki

berbagai profesi yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, seperti menjadi seorang guru, dosen, pengusaha, kepala Gampong (keuchik), menteri, dan bahkan presiden sekalipun. Akan tetapi dalam berkarier menjadi seorang pemimpin, juga harus memperhatikan hukum-hukum ataupun aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti tidak terabaikannya urusan rumah tangga, harus mendapatkan izin dan ridho terlebih dahulu dari suaminya bila ia sudah bersuami, agar menghindari dampak negatif terhadap dirinya dan agama.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Perempuan

a. Figur Pemimpin Perempuan

Di Kabupaten Aceh Besar terdapat dua Gampong yang dipimpin oleh perempuan (keuchik perempuan), salah satunya yaitu di Kecamatan Darussalam tepatnya di Gampong Miruk Taman. Ini dapat dijadikan acuan untuk melihat bahwa perkembangan pemikiran kaum perempuan dari tahun ketahun semakin berkembang, semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam dunia politik maupun organisasi lainnya yang dapat mewakili kaum perempuan di berbagai jenis kegiatan kemasyarakatan. Dalam kaitan ini telah banyak perempuan yang berhasil meraih jabatan, mulai dari tingkatan yang rendah sampai ke tingkatan yang tinggi dalam suatu lembaga atau negara. Kenyataan ini telah memunculkan banyak perdebatan di kalangan umat Islam, khususnya para ulama dan organisasi Islam lainnya yang berkaitan dengan pandangan Islam terhadap keberadaan perempuan dalam jabatan-jabatan strategis dalam sektor tersebut.

Keuchik merupakan pemimpin pemerintahan Gampong yang tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh aparat Gampong lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Terutama bagi seorang keuchik perempuan, dimana keuchik perempuan masih memerlukan peran pihak yang lain dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang keuchik perempuan di dalam pemerintahan Gampong sangat membutuhkan peran laki-laki, hal ini dikarenakan fisik seorang perempuan yang lebih lemah daripada seorang laki-laki. Tak terkecuali budaya masyarakat juga percaya bahwa sifat alamiah seorang perempuan terlihat dari kelembutannya, perempuan sulit mengambil ketegasan dalam suatu urusan, serta perempuan lebih mengedepankan emosi daripada rasionalitas, hal ini membuat kedudukan perempuan dalam kepemimpinan dapat melemahkan. Pandangan seperti ini

sangat diyakini dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya (DWI PRASETYONINGSIH, 2016).

Salah satu tokoh perempuan yang ikut serta dalam pemerintahan Gampong, khususnya di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar adalah ibu Ulyani yang merupakan seorang keuchik di Gampong Miruk Taman yang sudah menjabat selama 3 tahun. Berikut penjelasan dari ibu Ulyani:

Kebetulan saya sendiri sebagai seorang keuchik perempuan, mungkin kalau di Aceh masih langka, masih kurang atau belum banyaklah yang memimpin perempuan sebagai keuchik. Kalau di Aceh besar cuma dua orang. Kalau masalah filosofi, sebenarnya kita itu dari dulu memang ada pemimpin perempuan, perempuan bergarda depan seperti pahlawan di Aceh ada Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia, Ratu Safiatuddin, mungkin kalau di Indonesia ada ibu Kartini. Sebenarnya memang sudah ada dari dulu, mungkin di zaman dulu dizaman Nabi juga ada, tapi tidak kita pelajari ataupun kita dalam. Kita sebagai seorang perempuan sangat perlu menjadi seorang pemimpin, dalam keluarga misalnya, kalau kita tidak melatih diri agar bisa memimpin, misal dalam lingkup yang kecil saja, dalam keluarga, kita berumah tangga punya anak satu atau dua, dan suatu saat misalnya suami meninggal, otomatis perempuan ini yang jadi kepala keluarga. Malah menurut saya, kalau dalam suatu keluarga, meninggal suami, istri bisa jadi suami, seorang ibu bisa menjadi ayah, tapi coba kalau meninggal istri, kebanyakan keluarganya berantakan, anaknya gak terurus. Tetapi beda dengan istri atau ibu ini bisa mengurus anak dan bisa juga cari rezeki. Banyak kita lihat seperti itu, ibu-ibu berjualan dipasar menggantikan peran seorang suami. Apalagi dizaman modern ini kan, sangat banyak sekarang pemimpinan-pemimpin perempuan, misalnya bisa dikantor, seperti seorang guru contohnya jadi kepala sekolah.

Ibu Ulyani menekankan bahwa kepemimpinan perempuan sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang dilihat dari peran-peran publik yang diberikan perempuan. Ia menambahkan perempuan dituntut untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, mulai dari memimpin rumah tangga hingga memimpin masyarakat.

b. Kepemimpinan Perempuan Antara Persaingan dan Profesionalitas

Adapun faktor terpilihnya ibu Ulyani sebagai seorang keuchik yaitu banyaknya dukungan dari masyarakat yang meminta agar beliau menjabat sebagai keuchik, kemudian juga dikarenakan adanya faktor pendidikan dimana ibu Ulyani merupakan lulusan Sarjana Ekonomi di salah satu Universitas yang ada di Aceh, dan beliau juga seorang pebisnis dan pekerja keras. Di sisi lain juga adanya faktor keturunan, dimana ayah dari ibu Ulyani ini juga pernah menjabat sebagai seorang keuchik selama 20 tahun. Sifat beliau yang ramah dan murah senyum serta banyak memberikan solusi dan bimbingan kepada ibu-ibu yang datang kepadanya terhadap adanya permasalahan di

dalam rumah tangga. Selama ibu Ulyani menjabat sebagai keuchik, beliau sudah banyak membantu masyarakatnya, baik itu dalam segi materil maupun nonmateril. Kedekatan dengan masyarakat memang sudah menjadi keharusan seorang pemimpin dalam memimpin suatu Gampong. Berikut penjelasan dari ibu Ulyani:

Saya tidak berjuang, namun memang diminta oleh warga agar saya menjabat. Saya seorang ibu rumah tangga, tapi saya juga punya usaha, saya bukan seorang PNS tapi saya orang pebisnis. Dari dulu saya pekerja sendiri, sebenarnya dengan urusan saya sendiri sudah sangat-sangat sibuk, cuman ya bagaimana lagi saya diminta untuk menjabat. Memang benar-benar diminta, bahkan saya juga sudah menolak. Jadi kalau diminta rasa cinta dan sayang saya dengan kampung saya sendiri, saya katakanlah boleh saya coba menjabat yang penting dibantu. Mungkin begini, kan sekarang kita sudah ada dana desa, mungkin warga saya melihat saya punya usaha yang berhasil jadi bisa mengelola keuangan dengan benar. Saya asli memang orang sini, ayah saya saja dulu menjabat sebagai keuchik sampai 20 tahun, kemudian ke mukim lagi 20 tahun. 40 tahun hidup ayah saya untuk masyarakat, mungkin karna faktor keturunan juga bisa menyebabkan masyarakat percaya kepada saya sehingga meminta saya untuk menjabat. Selama saya menjabat, tantangan di dalam Gampong tidak ada, malah diluar Gampong juga tidak ada. Saya malah bisa membantu sampai ke kecamatan, saya menyiapkan satu buah ambulance pribadi saya untuk bisa membantu orang-orang yang sakit, jadi kalau ada yang sakit dalam satu kecamatan itu tinggal telpon saja. Saya juga membantu orang-orang yang sunat (khitan) gratis tiap tahun. Kalau dulu hanya dikampung saya saja, namun sekarang sudah sampai ke Kecamatan, kadang-kadang sampai 50 orang yang sunat seperti tahun kemarin (tahun 2020). Jadi ketika saya mempunyai rezeki yang lebih, saya dedikasikanlah untuk warga Kecamatan Darussalam.

Diantaranya penjelasan dari Ina Rezkina tokoh masyarakat Gampong Tanjung Selamat, Kabupaten Aceh Besar, sekaligus kepala sekolah MTsN 4 Banda Aceh, beliau mengatakan:

Untuk sekarang ini memang kepemimpinan perempuan itu bukan sesuatu hal yang luar biasa atau aneh, itu sudah biasa. Karena sudah banyak sekali pemimpin itu perempuan, jadi bahkan sampai ke tingkat presiden pun ada yang perempuan. Malah kalau ada orang yang berpikir khususnya dari kalangan laki-laki yang berpikir bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin itu perlu dipertanyakan lagi. Kecuali mungkin dalam hal memimpin shalat berjamaah dan itu makmumnya laki-laki itu yang tidak boleh. Tapi untuk memimpin orang atau suatu lembaga, memimpin masyarakat itu perempuan boleh memimpin.

Pernyataan Ibu Ina Rezkina di atas memberikan gambaran bahwasanya kepemimpinan tidak lagi dinilai dari jenis kelamin saja, namun dilihat pada potensi dan kemampuan, dengan beberapa batasan yang diatur dalam syariat.

c. *Penerimaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Perempuan*

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Darussalam, berbagai macam pendapat masyarakat dalam menanggapi persoalan kepemimpinan perempuan. Diantaranya yaitu dijelaskan oleh bapak Syamsul Bahri, salah satu warga di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, pendapatnya sebagai berikut:

Sebenarnya kepemimpinan baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja tergantung dari kesempatan yang diberikan. Untuk memimpin suatu institusi baik formal maupun informal itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh atasan, seperti contohnya kepala sekolah, camat, dan lain sebagainya, maka menurut saya kepemimpinan perempuan itu baik. Begitu juga dengan lembaga pemerintahan Gampong, seandainya dalam suatu Gampong yang menjadi keuchik adalah seorang perempuan, kalau pendapat saya pribadi tidak ada masalah. Namun, dalam konteks kita di Aceh kadang-kadang banyak orang yang belum bisa menerima, mungkin itu disebabkan oleh latar belakang pendidikan mayoritas warga kampung setempat, ataupun dikarenakan persoalan-persoalan yang ada dikampung tersebut susah untuk diselesaikan oleh seorang wanita yang menjadi seorang keuchik. Namun seandainya keuchik tersebut adalah tokoh masyarakat wanita dan dia sudah terbiasa dalam berorganisasi dan diterima oleh masyarakat, maka tidak ada masalah jika seorang wanita memimpin suatu desa, jika dia mampu memimpin dan dia dipilih, karena dalam sistem pemerintahan Gampong pada saat sekarang ini baik laki-laki maupun perempuan itu dipilih oleh warga setempat.

Terkait hal ini juga disampaikan oleh bapak Salamun, yang merupakan Keuchik di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam. Menurut beliau:

Perempuan boleh memimpin, selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara. Karena apa pun yang kita lakukan jika bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara maka dapat merugikan diri kita. Karena untuk apa kita mengejar jabatan jika harus bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Namun jika perempuan tersebut mampu serta mau menjadi seorang pemimpin dan memang dibutuhkan, maka menurut saya boleh. Tapi tidak untuk kepentingan tertentu, maka itu tidak baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Yang terpenting adalah seorang perempuan itu mampu dan mau menjadi pemimpin, karena orang yang mampu tetapi dia tidak mau maka tidak bisa menjadi pemimpin, begitu juga dengan orang yang mau tetapi tidak mampu.

Berdasarkan kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemimpin tidak hanya dari kalangan laki-laki saja, namun perempuan juga bisa memimpin suatu institusi ataupun organisasi tertentu baik itu dalam lembaga pemerintahan Gampong, sekolah, camat, dan lain sebagainya, selama perempuan tersebut mau serta mampu maka boleh seorang perempuan menjadi pemimpin, dengan alasan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku, begitu juga dalam pemerintahan desa.

d. Peluang dan Tantangan Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan merupakan suatu bentuk keikutsertaan perempuan dalam memimpin secara intelektual serta emosional dalam suatu kelompok yang dapat memberikan sumbangan yang baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materiil guna untuk dapat mewujudkan suatu tujuan tertentu yang akan tercapai. Hal ini sangat ditentukan dengan bagaimana cara pemimpin tersebut berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat dalam melaksanakan program, loyalitasnya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana cara pemimpin tersebut dalam mengambil suatu keputusan, karena seorang pemimpin harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat (Amtai Alaslan, 2017).

Dalam hal ini, sebagian masyarakat juga ada yang tidak setuju dengan adanya kepemimpinan perempuan terutama dalam pemerintahan Gampong. Diantaranya yaitu penjelasan dari bapak Hamdan sebagai ketua Tuha Peut di Gampong Tungkop, berikut penjelasannya:

Berbicara masalah perempuan itu dari dulu pemimpin perempuannya sudah ada, cuma kalau kita lihat hari ini dengan perkembangan zaman hari ini, mungkin hari ini bisa disebut apa pun yang terjadi didaerah kita tanpa perempuan itu gak bisa jalan, misalnya di Aceh Besar itu diterapkan kalau tidak masuk perempuan itu di anggota Tuha Peut rasanya tidak bagus. Perempuan itu tidak mesti memimpin, dia banyak tugas berat dalam keluarga. Jadi hari ini kita bisa lihat, dengan dia sibuk dalam memimpin suatu jabatan misalnya atau suatu sistem dalam organisasi itu kadang-kadang bisa terlupakan kegiatan di dalam rumah tangga. Jadi kalau secara umum jika perempuan yang memimpin itu tidak maksimal, karena perempuan itu ibu rumah tangga dan yang mengkoordinir rumah tangga itu adalah ibu. Tapi kalau dia sibuk dengan yang lain artinya gini, timbulnya rasa saling tidak pengertian. Jadi kalau pendapat saya itu boleh wanita itu berkarier, tapi kalau misalnya sampai dia meninggalkan keluarga sibuk dengan karirnya itu tidak bagus dari mata agama misalnya itu tidak bagus. Jadi pandangan saya ini bukan dari segi kerja dia atau karier dia, tetapi dia adalah seorang perempuan ada batasnya dia dalam berkarier, tapi hari ini bisa kita lihat kadang-kadang sudah melampaui daripada itu.

Dari penjelasan menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan ini belum maksimal, karena perempuan adalah seorang ibu dalam rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Jika perempuan yang memimpin suatu organisasi atau lembaga, maka kewajiban dia dalam rumah tangga pastinya akan terbengkalai karena sudah sibuk dengan karirnya. Namun pada saat sekarang ini perempuan juga dibutuhkan dalam lembaga apa pun, seperti halnya di Kabupaten Aceh

Besar yang sudah menerapkan bahwa perempuan harus ikut berpartisipasi dalam keanggotaan Tuha Peut. Menurut beliau, perempuan boleh berkarir tetapi jika harus meninggalkan keluarga dan sibuk dengan karirnya maka itu tidak baik dalam pandangan agama.

Tambahan pula bahwa posisi keuchik dianggap tidak sesuai untuk perempuan karena tuntutan peran keuchik dinilai tidak dibatasi waktu. Misalkan rapat yang sering diadakan di malam hari dan mungkin hingga larut malam. Begitu pula hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat seperti acara perkawinan, acara-acara besar, musibah kematian dan lain sebagainya yang berbeda dengan kepemimpinan perempuan dalam lembaga formal yang lain misalnya camat, kepala sekolah dan sebagainya yang mempunyai batas waktu dalam bekerja.

D. Kesimpulan

Perempuan saat ini, memiliki kemampuan dan keahlian sebagaimana yang dimiliki laki-laki, dan karena sebab itulah perempuan menjadi mungkin untuk memimpin (menjadi pemimpin). ketika perempuan menjadi pemimpin tidak harus berubah menjadi “seorang laki-laki” yang tegas dan berwibawa. Sebab, kepemimpinan juga ideal ketika berkenaan dengan kelembah-lembutan dan kasih-sayang (sesuai tabiat perempuan). Kepemimpinan perempuan dalam aspek filosofis adalah konsep yang terbuka tetapi senantiasa berhubungan secara dialogis dengan perkembangan zaman.

Kepemimpinan perempuan mengandung nilai-nilai filosofi yaitu terletak pada kodrat atau kedudukan seorang perempuan. Dimana perempuan juga mempunyai hak dan kebebasan dalam menjalankan kewajibannya, serta menjaga harkat dan martabat seorang perempuan. Kemudian Perempuan tidak lagi dipandang sebagai sosok yang lemah, akan tetapi memiliki fondasi penting dalam kehidupan keluarga, organisasi maupun lingkungan masyarakat. Namun dibalik hal tersebut, kepemimpinan seorang perempuan juga perlu dibatasi. Karena ada hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh perempuan dan harus dilakukan oleh laki-laki. Dalam hal ini juga adanya pro dan kontra mengenai kepemimpinan perempuan, terutama di Aceh yang masih sangat kental dengan budaya patriarki sehingga dapat mengurangi peluang bagi kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Berbicara mengenai kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat, terutama di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa

faktor budaya, agama, serta kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat setuju dengan adanya kepemimpinan perempuan, dan beberapa yang lain juga ada yang tidak setuju dengan adanya kepemimpinan perempuan.

Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan Gampong sangat jarang dijumpai di Aceh. Khususnya di Kabupaten Aceh Besar, fakta seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi. Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh kalangan perempuan menjadi hal yang sangat jarang di Kabupaten Aceh Besar, namun keikutsertaan serta keberhasilan perempuan menjadi seorang pemimpin, didasarkan karena adanya dukungan serta peluang yang diberikan oleh peraturan daerah, lunturnya budaya patriarki masyarakat, serta adanya penilaian positif dari masyarakat terhadap kaum perempuan.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya pandangan masyarakat mengenai problematika kepemimpinan perempuan yang terjadi pada saat ini terutama menjadi seorang keuchik perempuan tentunya banyak menimbulkan perbincangan yang tidak enak dari sebagian masyarakat yang belum bisa menerima adanya seorang keuchik perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya sudah tidak terlalu dipermasalahkan lagi tentang keberadaan seorang keuchik perempuan. Dalam hal ini dapat kita lihat sebagai contoh bahwa perkembangan pemikiran kaum perempuan dari tahun ketahun semakin berkembang, semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam dunia politik maupun organisasi lainnya yang dapat mewakili kaum perempuan di berbagai jenis kegiatan kemasyarakatan. Dalam kaitan ini telah banyak perempuan yang berhasil meraih jabatan, mulai dari tingkatan yang rendah sampai ke tingkatan yang tinggi dalam suatu lembaga atau negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aqqad, A. M. (1986). *Filsafat Al-Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Al-Qur'an*. Pustaka Firdaus.
- Almansur, D. C. F. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Amtai Alaslan. (2017). Persepsi Masyarakat Dan Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Otonomi Ilmu Administrasi*, No. 20 (20). <https://doi.org/10.31219/osf.io/kt543>
- Annisa Fitriani. (2015). Gaya Kepemimpinan Perempuan. *TAPiS*, Vol. 11 No.
- Dwi Prasetyoningsih. (2016). Strategi perempuan kepala desa dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis di desa kendal sewu kecamatan tarik kabupaten sidoarjo. *Journal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol 3 No 4.
- Fakih, M. (1996). *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fatimah, S. (2015). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No.
- Husein Muhammad. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. LKiS.
- Ismawardi. (2018). Tipologi kepemimpinan perempuan aceh (studi gender dan feminisme). *Jurnal Sosiologi USK Media Pemikiran & Aplikasi*, Vol. 12 No.
- Kaukab Siddique. (2012). *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Paramadina.
- M.N Ibad. (2011). *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*. Pustaka Pesantren.
- Nasaruddin Umar. (2000). *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Fikahati Aneska.
- Subhan, Z. (2004). *Kodrat perempuan: Takdir atau Mitos*. Pustaka Pesantren.
- Thalib, M. (2001). *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*. Baitussalam.
- Yulianti, R., Putra, dan D. D., & Takanjanji, P. D. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 10 No.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Khazanah*, Vol 1 (201).